



## HOTEL, RESTORAN, DAN WISATAWAN BERTUMBUH: APAKAH PENERIMAAN PAJAK DAERAH JUGA MENINGKAT?

Pius Aji Cakra Bagaskara <sup>1)</sup>, Suparna Wijaya <sup>2)\*</sup>

<sup>1)</sup> [pius.bagaskara@kemenkeu.go.id](mailto:pius.bagaskara@kemenkeu.go.id), Kementerian Keuangan

<sup>2)</sup> [suparnawijaya@upnvj.ac.id](mailto:suparnawijaya@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*penulis korespondensi

### Abstract

*This study aims to determine the influence of the tourism sector on local tax revenues as reflected in hotel taxes and restaurant taxes, while the tourism sector is seen from the number of hotels, restaurants and tourists. The data used is secondary data taken from the DJPK of the Ministry of Finance, the Central Statistics Agency and the Department of Youth, Sports and Tourism of Central Java Province from 2018 to 2021, while the objects studied were 35 regencies/cities in Central Java Province. The method used is a quantitative method with multiple linear regression of panel data with a random effect model. The results of this study indicate that simultaneously, all variables have a positive and significant effect on local tax revenues. Partially, the number of hotels has a significant positive effect, as well as after being moderated by the number of tourists. The number of restaurants itself has no effect on local tax revenues, although it is moderated by the number of tourists, it still has no effect. Furthermore, the number of tourists has a negative effect on local tax revenues. This research is expected to be able to provide input for local governments in formulating policies, especially in terms of local tax collection.*

**Keywords:** Hotel, Local tax, Restaurant, Tourist

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah yang tercermin dari pajak hotel dan pajak restoran, adapun sektor pariwisata ini dilihat dari jumlah hotel, restoran, serta wisatawan. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari DJPK Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistika serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai 2021, adapun objek yang diteliti adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel dengan model *random effect*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial, jumlah hotel berpengaruh signifikan positif, begitu juga setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan. Jumlah restoran sendiri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, meskipun dimoderasi dengan jumlah wisatawan, tetap tidak berpengaruh. Selanjutnya jumlah wisatawan justru berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan khususnya dalam hal pengumpulan pajak daerah.

**Kata Kunci:** Hotel, Pajak Daerah, Restoran, Wisatawan

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya, hal ini juga sebagai perwujudan dari pelaksanaan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia ini, mengingat luasnya wilayah serta beragamnya kondisi di Indonesia, sehingga diperlukan penyusunan kebijakan yang tepat. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristiknya masing-masing, maka kebijakan pada suatu daerah tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Menurut Badrudin dalam Akbar (2019), kebijakan pembangunan yang diterapkan harus berdasarkan kekhasan yang dimiliki daerah (*endogenous development*) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, maupun kelembagaan.



Dalam mengantisipasi keberagaman dan kekhasan masing-masing daerah ini, maka ditetapkan kebijakan otonomi daerah. Menurut Fauzi (2019), kebijakan yang resmi berlaku sejak penetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tahun ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, kekhususan, dan keistimewaan daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah ini, masing-masing daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus segala urusannya baik dari jalannya pemerintahan hingga pelaksanaan pembangunan. Kemudian dalam menjalankan urusan ini diperlukan pendanaan untuk melaksanakan belanja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adapun pendapatan daerah dibagi lagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun daerah telah diberi wewenang untuk mengumpulkan penerimaan berupa PAD, namun daerah masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut pemeriksaan dari BPK pada 2021, sekitar 88% pemerintah daerah di Indonesia berstatus belum mandiri, artinya pemda masih sangat bergantung pada transfer dana pemerintah pusat untuk dapat menjalankan pemerintahannya. Hal ini menjadi isu bagi daerah untuk berupaya meningkatkan tingkat kemandirian dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat ini adalah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana data APBD 2022 dari Portal Data SIKD, dari total pendapatan daerah sebesar 104 triliun rupiah, 63 triliun rupiah merupakan penerimaan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 1. Data Pendapatan Daerah Jawa Tengah tahun 2022

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi
Pendapatan Daerah	104.017,75 M	104.473,18 M
PAD	32.699,21 M	33.520,44 M
Pajak Daerah	20.995,15 M	20.549,61 M
Retribusi Daerah	1.131,04 M	940,51 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.278,31 M	1.352,79 M
Lain-Lain PAD yang Sah	9.294,72 M	10.677,53 M
TKDD (Penerimaan dari Pemerintah Pusat)	64.473,43 M	63.479,71 M
Pendapatan Lainnya	6.845,12 M	7.473,03 M
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.120,87 M	7.048,76 M
Pendapatan Hibah	384,77 M	421,37 M
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	339,47 M	2,90 M

Sumber: DJPK, data diolah (2023)

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah hanya sekitar 32%, nilai yang relatif kecil. Jawa Tengah sebenarnya memiliki potensi penerimaan dari banyak hal, dengan banyaknya kendaraan, banyaknya pabrik rokok, serta potensi pariwisata yang besar, seharusnya dapat dioptimalisasi untuk pemungutan



pajak daerah. Pariwisata sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pengembangan perekonomian, karena pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan daerah (Faiz dkk., 2021).

Sebagaimana dikutip dari buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka terbitan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (2022), Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak tempat tujuan wisata, dan terdapat tempat wisata yang paling banyak dikunjungi pada semester awal 2022, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Punthuk Setumbu dan Pantai Jatimalang, dan telah dikunjungi oleh lebih dari 28 juta pengunjung baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Dari potensi pariwisata yang besar ini, penerimaan pajak daerah dapat dioptimalisasi dengan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, maupun retribusi-retribusi lainnya. Dengan adanya kunjungan ke tempat-tempat wisata, para wisatawan tidak hanya berlibur, namun juga tinggal dan menginap di hotel atau penginapan. Selain itu para wisatawan juga melakukan konsumsi dengan mengunjungi restoran atau rumah makan, kemudian hal ini yang dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Sanjaya dan Wijaya (2020), di Sumatera Barat pada tahun 2015-2019, yang menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, serta jumlah restoran berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak restoran. Namun ternyata Fikri dkk (2019) menemukan hal lain, bahwa di kota Bandung pada tahun 2011-2017, jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Dari hal-hal tersebut, maka penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah. Maka dari itu, pada penelitian ini akan diteliti pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran yang dimoderasi jumlah wisatawan. Adapun penelitian ini menggunakan data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2021.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendanai jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, jumlah PAD ini dijadikan sebagai indikator tingkat kemandirian daerah, semakin besar proporsi PAD dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat, maka suatu daerah dianggap semakin mandiri. PAD sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi pajak daerah, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Alat Berat (PAB)
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- e. Pajak Air Permukaan (PAP)
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:



- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah (PAT)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dari jenis-jenis pajak diatas, pungutan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata antara lain adalah jasa perhotelan dan restoran, adapun kedua jenis pajak ini masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selanjutnya retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pungutan atas jasa yang berkaitan dengan pariwisata tergolong pada retribusi jasa usaha sebagaimana pada pasal 88 UU 1 2022 angka 3 huruf g, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penunjang penerimaan PAD, baik melalui PBJT maupun retribusi jasa usaha. Optimalisasi penerimaan PAD ini sangat penting untuk diupayakan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Suartini & Utama, 2013).

### **Pariwisata**

Mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan spesifik, seperti rekreasi, pengembangan pribadi, maupun untuk mempelajari keunikan daya tarik tertentu, dan dilakukan dalam waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas layanan. Kemudian Oktaviani (2020) menyatakan bahwa pariwisata merupakan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta taraf hidup dengan mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya. Ia juga menyatakan bahwa pariwisata ini merupakan kegiatan untuk bersenang-senang dan wisatawan cenderung berperilaku konsumtif selama melakukan kegiatan wisata, baik dengan mengeluarkan biaya untuk penginapan, makan minum serta transportasi.

### **Pajak Hotel**

Pajak hotel dalam konteks ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu termasuk dalam PBJT jasa perhotelan. Adapun jasa perhotelan ini meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyediaan ruang rapat atau pertemuan. Adapun jasa perhotelan yang dikecualikan adalah: 1) jasa tempat tinggal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; 2) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; 5) jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Sebagaimana disampaikan oleh Wulandari dkk. (2018), pajak hotel ini dikenakan berdasarkan jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel dengan tarif sebesar 10%, dan bukti pembayaran yang dilakukan ini dapat berupa nota penjualan.

### **Pajak Restoran**

Sama dengan pajak hotel, pajak restoran berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 juga termasuk dalam objek PBJT, yaitu berupa penjualan/konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa



meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Selain itu, makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh penyedia jasa boga atau catering juga merupakan objek pajak. Adapun pajak restoran ini dibebankan kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan dan/atau minuman dari restoran.

**Wisatawan**

Wisatawan merupakan individu atau kelompok yang melakukan kunjungan ke suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk rekreasi. Kemudian wisatawan ini dapat dikelompokkan berdasarkan asalnya, yaitu wisatawan dalam negeri dan juga wisatawan mancanegara. Suastika dan Yasa (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyaknya kunjungan wisatawan dapat meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata sehingga juga meningkatkan potensi penerimaan daerah, hal ini dapat dilihat dari berapa lama wisatawan tinggal di suatu daerah. Selain itu, pendapatan masyarakat di daerah wisata juga meningkat karena ada pembelanjaan yang dilakukan oleh wisatawan.

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan dan dibentuk berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Beberapa penelitian yang penulis jadikan referensi antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

<b>Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Lokasi dan Tahun</b>
Aldo Adam	Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	Jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel; Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel	Kota Manado, 2005-2011
Jundi Abdullah Faiz, Lucia Rita Indrawati, Gentur Jalunggono	Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang	Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD	Kabupaten Magelang, 2008-2018
Muhamad Fikri Nur Afrizal, Catur Martian Fajar, Yunika Komalasari	Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel	Jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel; Jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel	Kota Bandung, 2011-2017
Abdurrahman Habibie Alghifari	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016)	Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah hotel dan akomodasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD	Provinsi Jawa Barat, 2013-2016
Fernanda Arraniry	Analysis Influence of Tourism Sector to Regional Income in West Nusa Tenggara Province (Year 2012-2016)	Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD; Jumlah wisatawan berpengaruh negative terhadap PAD	Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012-2016



Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya	Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat	Jumlah hotel berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD	Sumatera Barat, 2015-2019
Naning Widiyanti, Diah Setyawati Dewanti	Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015	Jumlah hotel berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD	Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2015
Simon Patar Rizki Manalu, Muhammad Rahmat Hidayat, Evalina Pakpahan Damrus, Fajri Hadie	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Restoran Terhadap PAD Dan Progres Ekonomi Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2018	Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap PAD	Kabupaten Nias Selatan, 2014-2018

## METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data penerimaan pajak hotel dan restoran diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kemudian data jumlah hotel dan jumlah restoran diambil dari Badan Pusat Statistik, sedangkan data jumlah wisatawan diambil dari laporan statistik pariwisata terbitan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 4 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah sebagaimana terdapat pada tabel 3. Kabupaten/Kota yang masuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Kab. Cilacap      | 13. Kab. Karanganyar | 25. Kab. Batang     |
| 2. Kab. Banyumas     | 14. Kab. Sragen      | 26. Kab. Pekalongan |
| 3. Kab. Purbalingga  | 15. Kab. Grobogan    | 27. Kab. Pemalang   |
| 4. Kab. Banjarnegara | 16. Kab. Blora       | 28. Kab. Tegal      |
| 5. Kab. Kebumen      | 17. Kab. Rembang     | 29. Kab. Brebes     |
| 6. Kab. Purworejo    | 18. Kab. Pati        | 30. Kota Magelang   |
| 7. Kab. Wonosobo     | 19. Kab. Kudus       | 31. Kota Surakarta  |
| 8. Kab. Magelang     | 20. Kab. Jepara      | 32. Kota Salatiga   |
| 9. Kab. Boyolali     | 21. Kab. Demak       | 33. Kota Semarang   |
| 10. Kab. Klaten      | 22. Kab. Semarang    | 34. Kota Pekalongan |
| 11. Kab. Sukoharjo   | 23. Kab. Temanggung  | 35. Kota Tegal      |
| 12. Kab. Wonogiri    | 24. Kab. Kendal      |                     |

Tabel 3. Variabel Dependen dan Independen

Variabel Dependen	Satuan	Transformasi Data
Pajak Hotel dan Restoran (PHR)	Rupiah	Logaritma Natural



Variabel Independen	Satuan	Transformasi Data
Jumlah Hotel (Hot)	Buah	-
Jumlah Restoran (Res)	Buah	-
Jumlah Wisatawan (Wis)	Orang	Logaritma Natural

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel, adapun regresi data panel ini memiliki tiga permodelan yang nantinya akan dipilih metode yang terbaik. Tiga metode tersebut yaitu model *common/pooled*, model *fixed-effect*, dan model *random effect*. Adapun untuk memilih permodelan yang paling tepat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Chow, Hausman, dan LM sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4. Setelah memilih model terbaik untuk penelitian ini, kemudian perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan hasil yang didapat dari model dapat menunjukkan estimasi dengan tepat, tidak bias dan konsisten. Adapun uji asumsi klasik ditunjukkan sebagaimana pada tabel 5.

Tabel 4. Uji Pemodelan

Uji Model	H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>
Uji Chow	Model Common lebih baik dari Model Random	Model Random lebih baik dari Model Common
Uji Hausman	Model Random lebih baik dari Model Fixed	Model Fixed lebih baik dari Model Random
Uji LM	Model Common lebih baik dari Model Fixed	Model Fixed lebih baik dari Model Common

Tabel 5. Uji Asumsi Klasik

Uji Model	H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>
Uji Normalitas ( <i>Skewness and kurtosis test</i> )	Data Terdistribusi Normal	Data Tidak Terdistribusi Normal
Uji Kolinearitas ( <i>Variance Inflation Factor</i> )	Terdapat Hubungan Linear antar Variabel	Tidak Terdapat Hubungan Linear antar Variabel
Uji Heteroskedastisitas ( <i>Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test</i> )	Varian Data Homokedastis	Varian Data Heteroskedastisitas
Uji Autokorelasi ( <i>Wooldridge test</i> )	Tidak Terdapat Autokorelasi	Terdapat Autokorelasi

Apabila model terbaik telah terpilih dan uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan pengujian *Goodness of Fit Test* untuk menguji kebaikan model penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6. Setelah terpenuhi semua kriteria pengujian, kemudian dilakukan interpretasi persamaan regresi.

Tabel 6. Tes *Goodness of Fit*

Jenis Pengujian	H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>
Koefisien Determinasi/ Adjusted R-Square	-	-
Tes Simultan / F-Statistik	Semua variabel tidak berpengaruh	Minimal terdapat 1 variabel yang berpengaruh signifikan
Tes Parsial / Uji T	Variabel independen tertentu tidak berpengaruh	Variabel independen berpengaruh



Model yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PHR_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X1X3_{it} + \beta_5 X2X3_{it} + e_{it}$$

PHR = Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Jumlah Hotel (Hot)

$X_2$  = Jumlah Restoran (Res)

$X_3$  = Jumlah Wisatawan (Wis)

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

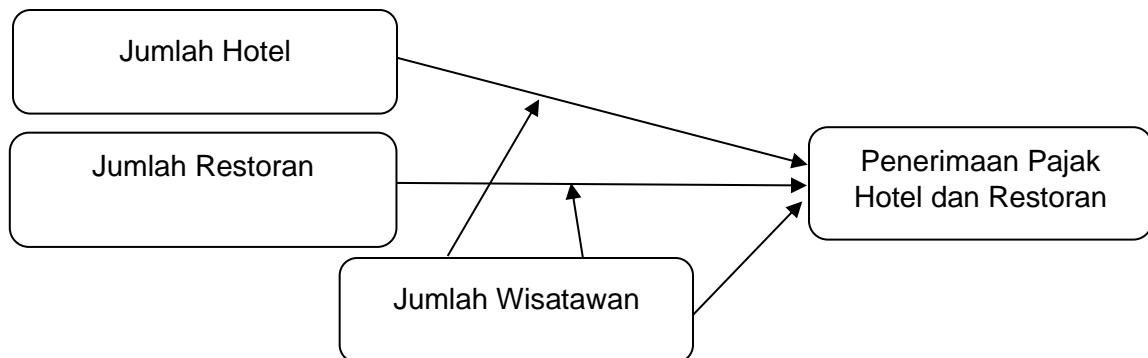
H<sub>1</sub> : Jumlah Hotel Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

H<sub>2</sub> : Jumlah Restoran Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

H<sub>3</sub> : Jumlah Wisatawan Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

H<sub>4</sub> : Jumlah Hotel yang Dimoderasi dengan Jumlah Wisatawan Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

H<sub>5</sub> : Jumlah Resoran yang Dimoderasi dengan Jumlah Wisatawan Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Pembahasan diawali dengan analisis deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Rangkuman dari data yang diolah dari penerimaan pajak hotel dan restoran serta faktor-faktor yang berpengaruh disajikan sebagai berikut, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai terkecil, median, dan juga nilai terbesar. Jika dilihat dari data penerimaan pajak hotel dan restoran, rata-rata penerimaan bernilai 16 miliar rupiah, dengan penerimaan terbesar senilai 279 miliar rupiah di Kota Semarang pada tahun 2019, nilai yang terpaut sangat jauh dengan penerimaan paling sedikit di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 yang hanya sebesar 481 juta. Hal ini terjadi karena Kota Semarang memang menjadi salah satu pusat perekonomian di Jawa Tengah, sehingga dari sisi penerimaan juga menjadi yang tertinggi. Apabila dilihat dari data selama 4 tahun, Kota Semarang selalu dapat mengumpulkan penerimaan pajak hotel dan restoran diatas 175 miliar rupiah, sedangkan daerah lain tidak ada yang melebihi 100 miliar rupiah. Kemudian dari data jumlah hotel, diketahui bahwa terdapat daerah yang tidak memiliki hotel, yaitu Kabupaten



Wonogiri dan Sragen, sedangkan Kabupaten Purbalingga juga baru memiliki hotel di tahun 2020. Adapun daerah yang memiliki hotel terbanyak ada di Kota Semarang. Kemudian dari jumlah Restoran, Kota Surakarta menjadi daerah dengan jumlah restoran terbanyak, sedangkan terdapat daerah yang pada tahun 2018 tidak memiliki restoran, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Dari variabel hotel dan restoran, ditemukan data yang bernilai 0, maka dalam pengolahan ini, seluruh data jumlah hotel dan jumlah restoran dilakukan *treatment* dengan penambahan 1 nilai, sehingga tidak ada data dengan nilai 0, namun tetap merepresentasikan kondisi di masing-masing daerah. Selanjutnya dari data wisatawan, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke masing-masing daerah sebanyak 1 juta orang tiap tahunnya, dengan daerah yang paling banyak dikunjungi adalah kota Semarang pada tahun 2019 yang pengunjungnya mencapai 7 juta orang, sedangkan yang paling sedikit dikunjungi adalah Kota Salatiga pada tahun 2020, dengan jumlah pengunjung hanya 23 ribu orang.

Tabel 7. Analisis Deskriptif

Deskriptif	PHR	Hot	Res	Wis
<i>Mean</i>	16.793.403.216	10	95	1.052.484
<i>Standar Deviasi</i>	38.229.762.918	16	176	1.163.467
<i>Min</i>	481.710.786	0	0	23.938
<i>Median</i>	6.508.528.203	5	39	601.185
<i>Max</i>	279.587.392.104	95	1.007	7.232.342

### Pemilihan Model Regresi

Tabel 8. Hasil Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier

Uji	Hipotesis	Prob
Chow	$H_0$ : Common Effect Model $H_1$ : Fixed Effect Model	0.0000
Hausman	$H_0$ : Random Effect Model $H_1$ : Fixed Effect Model	0.0580
Lagrange Multiplier	$H_0$ : Common Effect Model $H_1$ : Random Effect Model	0.0000

Kemudian yang perlu dilakukan dalam melakukan pengolahan data menggunakan data panel yaitu memilih model regresi yang tepat. Pengujian ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji Chow untuk menentukan antara model Common (*Pooled Least Square*) atau model *Fixed Effect*, kemudian Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan antara model *Random Effect* dan Common (*Pooled Least Square*), dan uji Hausman untuk menentukan antara model *Fixed Effect* atau model *Random Effect*. Adapun pemilihan model regresi ini ditunjukkan pada tabel 8.

Dari pengujian tersebut, apabila nilai probabilitas bernilai kurang dari 0.05, maka tolak  $H_0$ , Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah model *Random Effect*.

### Uji Asumsi Klasik

Tabel 9. Uji Asumsi Klasik

Uji	Pengujian	Prob
Normalitas	<i>Skewness and kurtosis tests</i>	0.0004
Multikolinearitas	<i>Variance Inflation Factor</i>	4.56



Heterokedastisitas	<i>Breusch–Pagan/Cook Weisberg test</i>	0.0031
Autokorelasi	<i>Wooldridge test</i>	0.0289

Kemudian setelah dipilih model yang akan dipakai, data perlu diuji dengan asumsi klasik, sebagaimana pada tabel 9, ada empat hal yang akan diuji pada uji asumsi klasik ini, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji *Skewness and Kurtosis* untuk mendeteksi normalitas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0004 (kurang dari 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak lolos uji normalitas. Kemudian untuk uji *Variance Inflation Factor* yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas menunjukkan nilai probabilitas 4.56 (kurang dari 10), sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut lulus uji multikolinearitas. Di sisi lain, untuk uji heteroskedastisitas (*Breusch–Pagan/Cook Weisberg test*) menunjukkan probabilitas sebesar 0.0031 (kurang dari 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak lolos uji heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi (*Wooldridge Test*) sama menunjukkan hasil probabilitas sebesar 0.0289 (nilainya dibawah 0.05), sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak lolos uji autokorelasi. Dari keempat uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa data ini lolos uji multikolinearitas, tetapi melanggar normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Namun, sebagaimana disampaikan Gujarati dan Porter (2015), uji asumsi klasik sebenarnya tidak perlu dilakukan dalam model *random effect* karena data pada model *random effect* menghasilkan residu yang telah terdistribusi normal, selain itu juga tidak terdapat relasi linear dan autokorelasi diantara variabel independen, model ini juga memiliki perbedaan varian dari residu, maka dari itu tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Adapun model final ini ditunjukkan pada tabel 10 sebagai berikut

Tabel 10. Tes Hipotesis

Variabel	Koefisien	z	P> z
Hot	.0215857	2.68	0.007
Res	.0002618	1.02	0.306
LnWis	-.3054609	-2.39	0.017
HotLnWis	.4487147	3.65	0.000
ResLnWis	-.0400388	-1.21	0.227
_Cons	20.55277	42.80	0.000

R-Squared : 0.7343

$$\text{PHR} = 20.55277 + 0.0215857 X1_{it} + 0.0002618 X2_{it} - 0.3054609 X3_{it} + 0.4487147 X4_{it} - 0.0400388 X5_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari tabel 10 diatas, dapat diketahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun besarnya pengaruh ini dilihat dari R-Squared yang bernilai 0,7343, artinya variabel Hot, Res, LnTur, HotLnTur, ResLnTur dapat menjelaskan variabel PHR sebesar 73.43%, adapun sisanya sebesar 26.57% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

Dapat diketahui bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan ( $P > |z| = 0.007$ ) secara positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten/kota dan tahun yang dipilih dalam penelitian ini, setiap ada kenaikan satu hotel, penerimaan pajak hotel dan restoran akan meningkat sebesar 0,0216 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis dan studi dari Solot (2018) dan Alghifari (2018) yang menyatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, artinya dengan bertambahnya hotel di suatu daerah, jumlah wajib pajak hotel juga bertambah, yang kemudian dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel. Kemudian ketika dimoderasi dengan jumlah wisatawan, jumlah hotel tetap berpengaruh signifikan dengan koefisien yang lebih besar, artinya jumlah wisatawan memperkuat pengaruh jumlah hotel terhadap



penerimaan pajak. Dapat dikatakan bahwa ketika jumlah wisatawan meningkat, wisatawan juga menggunakan layanan yang disediakan oleh hotel secara lebih banyak. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tingkat keterisian kamar hotel juga meningkat, hal ini menjadi faktor yang meningkatkan dasar pengenaan pajak hotel.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa jumlah restoran tidak berpengaruh ( $P > |z| = 0.306$ ) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, hal ini ternyata tidak sejalan dengan hipotesis dan penelitian dari Sanjaya dan Wijaya (2020) serta Widayanti dan Dewanti (2017) yang menemukan bahwa jumlah restoran berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah yang tercermin pada PAD. Namun temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Manalu dkk (2021), penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nias Selatan juga menunjukkan bahwa penambahan jumlah restoran tidak memberikan efek yang berarti kepada penerimaan pajak daerah yang tercermin dalam PAD. Hal ini juga sejalan oleh penelitian dari Aini dkk (2022) di Provinsi DIY, ia menemukan bahwa banyak pengelola restoran yang tidak melaporkan pendapatannya secara benar, hal ini didukung oleh pernyataan Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan yang membenarkan bahwa masih terapat wajib pajak restoran yang tidak tertib. Kemudian ketika diberikan moderasi oleh jumlah wisatawan, ternyata tidak mengubah apapun, jumlah restoran tetap tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Meskipun omzet restoran meningkat, tidak akan memberikan efek pada penerimaan pajak daerah jika tidak dilaporkan secara benar.

Kemudian jika dilihat dari variabel jumlah wisatawan, ternyata justru berpengaruh signifikan ( $P > |z| = 0.017$ ) negatif secara signifikan, peningkatan jumlah wisatawan justru akan mengurangi penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 0,305 persen. Hal ini bertentangan dengan hipotesis dan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain Faiz (2021) dan Manalu (2021) yang menemukan bahwa jumlah wisatawan memberi pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Namun hal ini sejalan dengan penelitian Arraniry (2012), ia menyatakan bahwa wisatawan yang berkunjung belum tentu menginap di hotel jika berkunjung kurang dari 24 jam. Selain itu, Adam (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah memiliki kerabat di daerah tersebut, sehingga mereka menginap di rumah kerabat dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak hotel.

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2021. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah hotel, jumlah restoran, serta jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran. Kemudian juga dilihat bagaimana pengaruh dari jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah, setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan, tetap bernilai positif dengan tingkat pengaruh yang lebih besar. Adapun jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, begitu juga setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan hal ini disebabkan karena masih terdapat pengusaha restoran yang tidak melaporkan pendapatannya dengan benar. Selain itu, jumlah wisatawan sendiri ternyata justru berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini dapat terjadi karena wisatawan yang berkunjung ke daerah menginap di rumah kerabat, sehingga tidak menginap di hotel dan tidak melakukan pembelanjaan di restoran. Saran untuk perbaikan, ada baiknya pemerintah kabupate/kota



meningkatkan pengelolaan wisata agar dapat lebih menarik wisatawan, khususnya wisatawan dari luar daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, karena wisatawan dari luar daerah pada umumnya akan tinggal di hotel dan melakukan pembelanjaan di restoran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. N., Susanto, J., & Winarti, A. S. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 841–850. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.443>
- Akbar, M. F. (2019). *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau Dari Ekonomi Islam*.
- Alghifari, A. H. (2018). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016)*.
- Arraniry, F. (2012). *Analysis Influence of Tourism Sector to Regional Income in West Nusa Tenggara Province*.
- Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. (2022). *Statistik Pariwisata: Jawa Tengah dalam Angka*.
- Faiz, J. A., Indrawati, L. R., & Jalunggono, G. (2021). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(2), 632–641.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik. *SPEKTRUM HUKUM*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Fikri, M., Afrizal, N., Martian Fajar, C., & Komalasari, Y. (2019). Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. In *Jurnal Sain Manajemen* (Vol. 1, Issue 1). <http://ejurnal.univbsi.id/index.php/jsm/index>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Salemba Empat.
- Manalu, S. P. R., Hidayat, M. R., Pakpahan, E., Damrus, D., & Hadi, F. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Restoran Terhadap PAD Dan Progres Ekonomi Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2018. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(2).
- Oktaviani, T. (2020). *Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- Portal Data SIKD. (n.d.). Retrieved August 4, 2023, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=11&pemda>-->
- Sanjaya, S., & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 559–568. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26553>
- Solot, F. T. (2018). Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). In *Jurnal Ekobis Dewantara* (Vol. 1, Issue 2). [www.jogja.tribunnews.com](http://www.jogja.tribunnews.com),
- Suartini, N. N., & Utama, M. S. (2013). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2, 44684.



- Suastika, I. G. Y., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(7), 165233.
- Widayanti, A., & Dewanti, D. S. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(2), 101–109.
- Wulandari, A. S., Deviyanti, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). *Analisis Potensi Pajak Hotel Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara)*.